

NAN

**ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH PALEMBANG
TERHADAP KEMANDIRIAN KOTA PALEMBANG**



Skripsi Oleh:

NICO FERDINAND P

01081002069

Ekonomi Pembangunan

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat-Syarat

Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

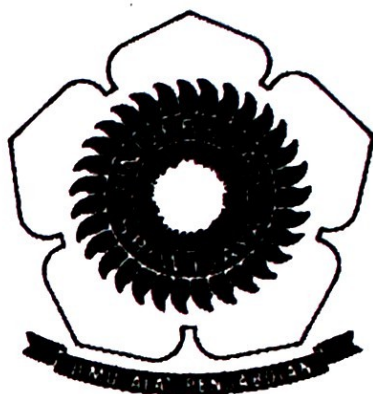
2014

2: 27952 / 28534



S
352.4807
Nie
a
2014
C-143166

**ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH PALEMBANG
TERHADAP KEMANDIRIAN KOTA PALEMBANG**



Skripsi Oleh:

NICO FERDINAND P

01081002069

Ekonomi Pembangunan

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat-Syarat

Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

2014

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF
ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH PALEMBANG
TERHADAP KEMANDIRIAN KOTA PALEMBANG

Disusun oleh:

Nama : Nico Ferdinand P
NIM : 01081002069
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian/Konsentrasi : Keuangan Daerah


Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.

Tanggal Persetujuan

Dosen pembimbing

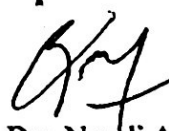
Tanggal: 18 April 2014

Ketua


Drs. Fachrizal Bachri, M.Sc
NIP 195710201984031002

Tanggal: 18 April 2014

Anggota


Drs. Nazeli Adnan, Si
NIP 195804171988101002

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH PALEMBANG TERHADAP KEMANDIRIAN KOTA PALEMBANG

Disusun oleh:

Nama : Nico Ferdinand P
NIM : 01081002069
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian/Konsentrasi : Keuangan Daerah

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 09 Juni 2014 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif

Inderalaya, 09 Juni 2014

Ketua



Drs. Fachrizal Bachri, M.Sc
NIP 195710201984031002

Anggota



Drs. Nazeli Adnan, Si
NIP 195804171988101002

Anggota



Dr. Azwardi, SE, M.Si
NIP 196805181993031003

Mengetahui,
Ketua Jurusan



Dr. Azwardi, SE, M.Si
NIP 196805181993031003

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nico Ferdinand P
NIM : 01081002069
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian : Keuangan Daerah
Fakultas : Ekonomi

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul:

Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Palembang Terhadap Kemandirian Kota Palembang

Pembimbing :
Ketua : Drs. H. Fachrizal Bachri, M.Sc
Anggota : Drs. Nazeli Adnan, M.Si
Tanggal Ujian : 09 Juni 2014

adalah benar hasil karya Saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan Saya ini tidak benar dikemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar sarjanaan.

Inderalaya, 09 Juni 2014

Pembuat Pernyataan,



NICO Ferdinand P
01081002069

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul “Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Palembang Terhadap Kemandirian Kota Palembang”. Skripsi adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat Sarjana Ekonomi Program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini membahas mengenai kemampuan keuangan daerah di Kota Palembang terhadap kemandirian Kota Palembang. Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai kendala. Kendala tersebut dapat diatasi berkat bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Dosen Pembimbing
2. Ketua Jurusan
3. Sekretaris Jurusan
4. Paradosen penguji yang telah memberikan kritik dan saran
5. Orangtua

Penulis

Nico Ferdinand

ABSTRAK

ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH PALEMBANG TERHADAP KEMANDIRIAN KOTA PALEMBANG

Oleh:

Nico Ferdinand P

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan kemandirian Kota Palembang terhadap kemandirian kota Palembang dlm periode 2002 sampai dengan 2012. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dapat diperoleh di Badan Pusat Statistik Palembang (BPS). Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan kemandirian Kota Palembang cukup mandiri dalam membiayai pembangunan di Kota Palembang tersebut. Hal tersebut didukung dari baiknya pendapatan asli daerah dikota Palembang.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Kemampuan Keuangan Daerah, Kemandirian

ABSTRACT

THE ANALYSIS OF FINANCIAL CAPABILITY OF PALEMBANG IN SUPPORTING THE SELF-SUFFICIENCY OF THE CITY

By:

Nico Ferdinand P

(Advisors: Drs, Fachrizal Bachri, M.Sc. and Drs. Nazeli Adnan, M.Si.)

The objective of this study is to reveal the financial capability of Palembang municipality in supporting the self-sufficiency of the city during the period from 2002 up to 2012. The study uses the secondary data obtained from the central statistic agency of Palembang (BPS). The technique of analysis used in this study is descriptive qualitative and quantitative descriptive. The result of this study indicates that the financial capability of Palembang is adequate to support the self-sufficiency of Palembang in financing the development of the city of Palembang. This condition is supported by the regional original revenue of Palembang which is relatively good.

Keywords: *Regional Original Revenue, Regional Financial Capability, Self-sufficiency.*

Diterjemahkan oleh:



Drs. Majelis M.S.L.S.

(Pustakawan dan guru bahasa Inggris)

RIWAYAT HIDUP

Nama Mahasiswa : Nico Ferdinand P

Jenis Kelamin : Laki – Laki

Tempat / Tanggal Lahir : Kisaran, 15 Juli 1990

Agama : Kristen Protestan

Status : Belum Menikah

Alamat (Rumah) : Proyes Small Holder Dusun VI kec. Sei Balai. Kisaran

Alamat Email : nicoferdinandperanginangin@yahoo.co.id

Pendidikan Formal :

Sekolah Dasar : SD Negeri 014626 Proyek Smaal Holder Sei Balai

SLTP : SLTP Methodist2 Kisaran

SMU : SMU Negeri 4 Kisaran

Pendidikan Non Formal : -

Pengalaman Organisasi : - Pengurus HIMEPA Divisi Kerohanian Periode
2009-2010
- Anggota Persekutuan Okumene (PO) Neraca
Kasih Fakultas Ekonomi

Penghargaan Prestasi : -



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

PERYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	ii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	iv
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1.Landasan Teori	10
2.1.1. Otonomi Daerah	10
2.1.2. Kemandirian Daerah	12
2.1.3. Teori Pertumbuhan Ekonomi	13
2.1.4. Desentralisasi Fiskal.....	14
2.2.Manejemen Strategis Meningkatkan Penerimaan asli Daerah	16

2.3.Potensi Daerah Sebagai Sumber Utama Untuk Meningkatkan PAD Dalam Pendanaan Pembangunan Daerah.....	18
2.4.Pendapatan Asli Daerah	21
2.5.Pengertian Alokasi Usaha	25
2.6.Konsep Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	26
2.7.Kerangka Konseptual	29
2.8.Penelitian Terdahulu	31
2.9.Hipotesis.....	34

BAB III METODE PENELITIAN

3.1.Ruang Lingkup Penelitian.....	35
3.2.Jenis dan Sumber Data	35
3.3.Teknik Analisis	35
3.3.1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	36
3.3.2. Derajat Otonomi Fiskal	37
3.3.3. Kapasitas Fiskal.....	38
3.3.4. Elastisitas PDRB terhadap PAD	38
3.4.Batasan variabel	39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian	41
4.1.1. Gambaran Umum Kota Palembang	41
4.1.2. Pemerintahan Kota Palembang	42
4.1.3. Gambaran Perekonomian Kota Palembang	43
4.1.4. Struktur Ekonomi Kota Palembang	45
4.1.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi	48
4.1.6. PDRB Perkapita Kota Palembang.....	51
4.2. Pembahasan.....	52
4.2.1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Palembang	52

4.2.2. Derajat Otonomi Fiskal (DOF)	53
4.2.3. Kapasitas Fiskal	58
4.2.4. Pengaruh PDRB terhadap PAD.....	59

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	62
5.2 Saran.....	63
Daftar Pustaka	65
Lampiran	68

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 PDRB Kota Palembang Menurut Lapangan Usaha Tahun 2004 hingga 2012.....	5
Tabel 4.1. Jumlah Penduduk Per kecamatan Kota Palembang Tahun 2012	42
Tabel 4.2 Data Perkembangan PAD dan PDRB Kota Palembang Tahun 2002-2012	44
Tabel 4.3 Produk Domestik Regional Bruto Kota Palembang Tahun 2012	45
Tabel 4.4 Persentase struktur ekonomi Kota Palembang Menurut Sektor Primer, Sekunder dan Tersier.....	46
Tabel 4.5 Kontribusi PDRB Kota Palembang Tahun 2012.....	47
Tabel 4.6 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Palembang Tahun 2008-2012.....	49
Tabel 4.7 Pendapatan Regional Perkapita Kota Palembang Tahun 2005-2012...	51
Tabel 4.8 Tabel Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Tahun 2001 hingga 2012.....	52
Tabel 4.9 Tabel Derajat Otonomi Fiskal (DOF) untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Total Penerimaan Daerah (TPD).....	54
Tabel 4.10 Tabel Derajat Otonomi Fiskal (DOF) untuk Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP) dan Total Penerimaan Daerah (TPD).....	55
Tabel 4.11 Tabel Derajat Otonomi Fiskal (DOF) untuk Sumbangan Bantuan Daerah (SB) dan Total Penerimaan Daerah (TPD)	56
Tabel 4.12 Tabel Derajat otonomi Fiskal (DOF) Untuk Dana Asli Usaha (DAU) Penerimaan Asli Daerah).....	57
Tabel 4.13 Tabel PDRB (ADHB) dan Jumlah Penduduk dan Jumlah Kecamatan terhadap Kebutuhan Fiskal Standar dan Kebijakan Fiskal.....	58
Tabel 4.14 Tabel PDRB atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan dan Jumlah Penduduk.....	59

Tabel 4.14 Nilai persentase Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).... 60

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Kerangka Pemikiran.....	31
Gambar 4.1 Persentase Struktur Ekonomi Kota Palembang menurut Sektor Primer, Sekunder dan Tersier (dengan migas) tahun 2012	49
Gamabr 4.2 Laju pertumbuhan Ekonomi kota Palembang Tahun 2011-2012	51

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 PDRB Palembang Menurut Lapangan Usaha.....	68
Lampiran 2 Jumlah Penduduk Perkecamatan Kota Palembang	
Tahun 2012	68
Lampiran 3 Data Perkembangan dan PDRB Kota Palembang	
Tahun 2002-2012	69
Lampiran 4 Produk Domestik Regional Bruto Kota Palembang	
Tahun 2012.....	69
Lampiran 5 Persentase Struktur Kota Palembang Menurut	
Sektor Primer	70
Lampiran 6 Kontribusi PDRB Kota Palembang	70
Lampiran 7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Palembang.....	71
Lampiran 8 Derajat Otonomi Fisikal untuk Bagi Hasil Pajak	
dan Bukan Pajak (BPHBP) dan Total Penerimaan	
Daerah	71
Lampiran 9 Tabel Derajat Otonomi Fiskal untuk sumbangan	
bantuan Daerah dan Total Penerimaan Daerah.....	72
Lampiran 7 Tabel Derajat Otonomi Fiskal (DOF) untuk Dana	
Bagi Hasil Usaha dan Penerimaan Asli Daerah.....	73
Lampiran 8 Tabel PDRB dan Jumlah Penduduk dan Kecamatan	

terhadap Kebutuhan Fiskal Standar dan Kebijakan

Fiskal..... 74

Lampiran 9 Tabel PDRB atas Dasar Harga Berlaku dan Atas

Dasar Harga Konstan dan Jumlah Penduduk..... 75



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Cita-cita dan tujuan nasional memberikan arah bagi pelaksanaan pembangunan agar dapat berjalan dengan efektif dan sesuai dengan sasarannya untuk melaksanakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Tujuan pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis (Suahasil dan Nurkholis, 2006:134). Untuk melaksanakan tujuan tersebut diperlukan adanya kebijakan yang mampu merealisasikan cita-cita dan tujuan tersebut.

Desentralisasi pada dasarnya terdiri dari desentralisasi administrasi dan desentralisasi ekonomi (Departemen Keuangan Republik Indonesia, 2008:16). Pelaksanaan desentralisasi diwujudkan melalui pemberian bantuan dalam bentuk transfer melalui pemberian bantuan pemerintah pusat, ditambah dengan argumen untuk menjaga pertumbuhan dan stabilitas ekonomi serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menyebabkan lebih menguatnya sistem sentralisasi (Departemen Keuangan Republik Indonesia, 2009:2).

Menurut Mardiasmo (2002:3) sistem sentralisasi yang dijalankan oleh pemerintah pusat selama ini melahirkan krisis ekonomi dan kepercayaan yang berdampak positif dan negatif bagi upaya peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dan memunculkan ketergantungan pemerintah daerah dalam hal

penetapan kebijakan yang diambil di daerah dikarenakan selalu menantikan kebijakan yang diatur dari pusat dan berlaku secara umum di daerah.

Halim (2001:125) menjelaskan bahwa ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi, yaitu:

1. Kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya.
2. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar.

Dalam Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa daerah memiliki kewenangan dalam mengelola daerahnya sendiri secara mandiri dan bertanggung jawab terhadap kepentingan masyarakatnya. Daerah diberikan kewenangan dalam mengelola daerahnya sendiri secara mandiri dan mampu memenuhi kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundangan.

Pada prinsipnya kebijakan otonomi daerah ini adalah untuk mendukung pembangunan nasional di negeri ini demi tercapainya pemerataan kemampuan daerah dari berbagai aspek. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dalam menjalankan otonomi seluas-luasnya berdasarkan asas otonomi.

Indikator kemandirian keuangan suatu daerah adalah rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Dana Perimbangan dan pinjaman, dengan demikian PAD dan Dana Perimbangan merupakan sumber pengeluaran pemerintah daerah yang berpengaruh positif terhadap pengeluaran pemerintah suatu daerah. Pelaksanaan pembangunan menghadapi beberapa kendala diantaranya keterbatasan sumberdaya alam dan sumber dana pembangunan.

Sumber-sumber penerimaan daerah mengacu kepada undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah diberi hak untuk mendapatkan sumber keuangan berupa kepastian tersediannya pendanaan dari pemerintah sesuai urusan pemerintah yang diserahkan yakni kewenangan memungut sekaligus mendayagunakan pajak dan retribusi daerah, hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya serta untuk mengelola kekayaan daerah untuk mendapatkan sumber-sumber pembiayaan tersebut (Yuwono, 2008:48).

Sumber penerimaan daerah seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD) diwujudkan di daerah dengan kewenangan memungut pajak dan retribusi daerah yang diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 2000 dengan peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang di atas, daerah diberi kewenangan untuk memungut 11 jenis pajak dan 28 jenis retribusi daerah yang sampai saat ini terjadi ketimpangan yang relatif besar terhadap distribusi kewenangan perpajakan

antara pusat dan daerah yang tercermin dari jumlah penerimaan pajak yang tidak berdampak besar bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pembiayaan kebutuhan disebagian besar daerah pada kenyataannya hanya memiliki PAD kurang dari 10 persen dan hal ini sangat bervariasi disetiap daerah yakni antara 5 persen - 10 persen karena kewenangan perpajakan (*taxing power*) daerah sangat terbatas dan akhirnya akan bermuara pada rendahnya kemampuan keuangan daerah (Yuwono, 2008:47).

Indikator rendahnya kemampuan daerah dalam membiayai keuangan daerah dapat dilihat dari Indek Kemampuan Rutin (IKR) yang diperoleh dari besarnya rasio perubahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pengeluaran rutin daerah. Dalam era otonomi daerah sekarang ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi.

Pemerintah daerah perlu berupaya melakukan program peningkatan kemampuan keuangan daerah dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang asli milik daerah yakni dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi tulang punggung pendapatan yang diperoleh dari kekayaan yang dimiliki oleh daerah terutama potensi daerah dari Pendapatan Asli Daerah. Potensi lainnya yang menguatkan upaya pemerintah perlu melihat dari sisi sektor ekonomi daerah

yang tertuang dalam masing-masing sektor lapangan usaha dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Kondisi sektor ekonomi tersebut dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah seperti pada Tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1.
PDRB Kota Palembang Menurut Lapangan Usaha Tahun 2004 hingga 2012
(dalam milyar rupiah)

No	Lap.Usaha	Tahun (milyar)								
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Pertanian	2.916	3.030	2.446	2.710	2.654	2.666	2.831	2.995	3.052
2	Pertambangan	2.197	2.059	3.359	3.405	3.444	3.490	3.492	3.601	3.655
3	Industri	2.947	3.158	2.457	2.350	2.498	2.685	2.385	3.031	3.237
4	Listrik dan gas	109	119	64	69	70	76	79	87	135
5	Bangunan	876	927	1.001	1.057	1.138	1.234	1.356	1.529	1.684
6	Perdagangan hotel	2.761	2.972	1.772	1.993	2.038	2.181	2.355	2.614	2.813
7	Pengangkutan	806	864	594	661	776	883	990	1.138	1.230
8	Keuangan dan sewa	546	604	511	562	607	653	710	765	836
9	Jasa-jasa	960	1.014	984	1.122	1.208	1.340	1441	1.567	1.692
PDRB		14.15	14.75	13.19	14.10	14.43	15.20	16.09	17.33	18.33

Sumber:-BPS Palembang, PDRB kota Palembang Tahun 2013.

Berdasarkan pada Tabel 1.1 tentang PDRB Kota Palembang yang memiliki sembilan lapangan usaha menunjukkan nilai dari PDRB tersebut memberikan dampak terhadap besarnya Indeks Penampilan PAD (IPP) yang menerangkan tentang kuat atau lemahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membangun pembangunan kota Palembang yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengkaji keterkaitannya dengan Pendapatan Asli Daerah.

Pertanian di Palembang memiliki nilai sumbangan kepada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang cukup baik, dan nilai yang tertinggi yaitu ditahun 2012 sebesar 3.052 (dalam milyar), begitu juga dengan hasil nilai untuk

Pertambangan, Industri, Perdagangan Hotel memiliki nilai diatas 2.000 (dalam milyar). Hal ini cukup baik untuk melakukan pembangunan di Kota Palembang tersebut.

Sedangkan untuk lima lapangan usaha lainnya Kota Palembang memiliki nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan lapangan usahanya seperti Listrik dan Gas, Bangunan, Pengangkutan, Keuangan dan Sewa, Jasa-Jasa memiliki nilai dibawah 1000 (dalam milyar rupiah). Untuk nilai tersebut Palembang cukup lemah untuk membangun pembangunan Kota Palembang tersebut. Apabila semakin tinggi nilai Produk Domestik Regional Bruto suatu daerah maka sangat baik untuk melakukan pembangunan daerah tersebut.

Ciri utama kemampuan suatu daerah adalah terletak pada kemampuan keuangan daerah, artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan dalam menggali sumber keuangan sendiri untuk menjalankan fungsi pemerintahan, Faktor keuangan suatu hal yang sangat penting karena hampir tidak ada kegiatan pemerintahan yang tidak membutuhkan biaya.

Pemerintah daerah tidak hanya bisa menggali sumber-sumber keuangan akan tetapi juga sanggup mengelola dan menggunakan secara *value for money* (nilai uang) dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga ketergantungan kepada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin dapat ditekan. Dengan dikurangnya ketergantungan kepada pemerintah pusat maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sumber keuangan terbesar. Kegiatan ini hendaknya didukung juga oleh kebijakan perimbangan keuangan pemerintah

pusat dan daerah sebagai prasyarat dalam sistem pemerintahan Negara (Koswara, 2000:50).

Otonomi daerah dan desentralisasi membutuhkan kesiapan semua pihak di daerah baik eksekutif, legislatif maupun masyarakat di daerah. Salah satu aspek penting pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dengan menggali sumber-sumber potensi daerah yang belum dioptimalkan oleh daerah dalam wadah desentralisasi fiskal otonomi daerah dibawah desentralisasi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Oleh karena itu diperlukan manajemen keuangan daerah yang mampu mengontrol kebijakan keuangan daerah yang mampu mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel (Kaho,1991:123).

Pertumbuhan ekonomi di Kota Palembang akan meningkatkan pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan disegala pelosok wilayah selain pemanfaatan bantuan dari pusat dan investasi pihak swasta. Pendapatan Asli Daerah sampai dengan saat sekarang lebih banyak dimanfaatkan untuk pengeluaran rutin daerah meskipun porsinya masih relatif kecil, sedangkan pengeluaran pembangunan lebih tergantung pada pemerintah pusat.

Sementara itu keterbatasan sumber dana pembangunan membuat ketimpangan antar daerah. Daerah yang memiliki sumber dana pembangunan yang tinggi dapat membiayai sebagian besar pengeluaran pemerintah daerahnya, sementara daerah yang memiliki sumber dana yang rendah memiliki ketergantungan pada dana dari pemerintah pusat.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang sebelumnya, maka dapat diambil pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kemandirian keuangan daerah di Kota Palembang?
2. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang selama Tahun 2002 hingga 2012?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tingkat kemandirian keuangan daerah di Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang selama tahun 2002 hingga 2012.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membiayai keuangan daerah guna melakukan pembangunan di Kota Palembang

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah Kota Palembang dalam mengupayakan peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
- b. Diharapkan dapat menambah wawasan penulisan dalam memahami seluk beluk Pendapatan Asli Daerah untuk Kemampuan Kemandirian Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonymus, 1999, *Undang-Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*. BP Panca Usaha. Jakarta.
- Bird dan Vaillancourt, 2000:4 dalam Susilo, 2002 tentang *Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi daerah*. Kediri
- Blakely, Edward J., 1989, "*Planning Local Economic Development (Theory and Practice)*", Sage Publication, Inc, Newburry Park, California
- Brannon, Julia, 2005, *Mixing methods: Qualitative and Quantitative Research*, Edisi ke V terjemahan Sumarno, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Boediono. 1985. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. BPFE UM. Yogyakarta
- Crista S.D Siallagan, 2005 "*Analisis Posisi Fiskal di Sumatera Utara*", Medan. Sumatera Utara
- Darwanto & Yulia Yustikasari. 2006. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*. Simposium Nasional Akuntansi X.
- Halim, 2004, *Untuk Mengetahui Keberhasilan Suatu Daerah Dalam Mengelola Penerimaannya Daya Pajak*. Jakarta
- Kaho, 1991:123 *Analisis Potensi Keuangan Daerah Dan Strategi Kemampuan Keuangan Daerah*. Brawijaya. Malang
- Kuncoro dan Mudrajat. 1995. *Desentralisasi Fiskal di Indonesia, Dilema Otonomi dan Ketergantungan*, Journal : Prisma, No.4,3-17
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi Offset. Yogyakarta
- _____. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah (Serial Otonomi Daerah dan Good Governance)*. Andi Offset. Yogyakarta.
- Meliala, T, S. 1991. *Perpajakan Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Yama Widya Dharma.

- Moleong, J.L. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Patton. M,Q. 1987. *Qualitative Evaluation Methods*. Beverly Hills : Sage Publications.
- Prawirohardj, S. (1984:202) retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan.
- Radianto dan Elia.1997. *Otonomi Keuangan DaerahTingkat II Suatu Studi di Maluku*.Journal: Prisma, VOL.IX,No.3.24-37.
- Saragih, P.J. 2003.*Desentralisasi Fiskaldan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Rida Andesta 2009. *Analisis kemampuan Keuangan Daerah Kota Palembang*. Palembang
- Sidik, M. 2003. "Format HubunganKeuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Yang Mengacu Pada Pencapaian Tujuan Nasional". *Bunga Rampai Desentralisasi Fiskal*. Jakarta: DepartemenKeuangan.
- Sumitro, 1988. *Ekstensifikasi Pajak/Retribusi (meningkatkan retribusi daerah dan strateginya)*. Pekalongan. Jawa Tengah 1988.
- Sutrisno, P.H. 1982. *Dasar-dasar Ilmu Keuangan Negara*. BPFE UGM. Yogyakarta.
- Sony, Y. 2008. *Memahami APBD dan Permasalahannya (Panduan Pengelolaan Keuangan Daerah)*. Bayu media Publishing. Jawa Timur (warwan ;2004 : 2).
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1974
- Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah*. Citra Umbara. Bandung.
- Undang-Undang No 34 Tahun 2000 Tentang *Perubahan Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang *Pemerintahan Daerah*. Kuraiko Pratama. Bandung.
- Undang-Undang No.25 Tahun 1999 tentang *Perimbangan keuangan antara pusat dandaerah*. Kuraiko Pratama. Bandung.

Widjaja. 2008. *PAD terdiri dari pajak, retribusi, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah*. Tangerang

Yani, Ahmad. 2002 *Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Daerah Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada , Jakarta.

Yasinta, 2008. *Elastisitas Permintaan Dan Penawaran*. (Online, <http://www.wordpress.com>., diakses 7 Juli 2013).

Yustika dan Erani, A. 2006. *Perekonomian Indonesia (deskripsi, preskripsi dan kebijakan)*. Banyumedia Publishing. Malang.

Yuwono, Sony, 2008, *Memahami APBD dan Permasalahannya (Panduan Pengelolaan Keuangan Daerah)*, Bayumedia Publishing, Jawa Timur.

<http://birokrasi.kompasiana.com/2011/10/06/percepatan-pembangunan-dengan-desentralisasi-fiskal-399263.html>.

<http://www.palembang.go.id/?nmodul=halaman&judul=keadaaan-geografis&bhsnyo=id>

<http://pupungph.wordpress.com/tag/kemandirian-daerah/>

<http://www.scribd.com/doc/113880325/Tabel-Publikasi-PDRB-Kabkot-2005-2009>

http://www.sumedangkab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=94&Itemid=50.